BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Cibeunying

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negeri Prancis pada jaman pemerintahan Nepolion Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama "*Cope Napolen"*. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis Kepada Belanda diterapkan pula oleh belanda kepada Negara Indonesia pada saat Belanda menjajah Negara Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting"* (pajak penghasilan).

Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Negara Indonesia masih diduduki oleh tentara Jepang.

Maksud dari pengalihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van vinancial",* yang kemudian diganti dengan jaman *"Zeinenbu"* oleh pemerintahan jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942 nama tersebut kemudian diubah menjadi "*Kantor Inspeksi Keuangan"* dan berkantor di Gedung Concordia (yang sekarang berubah menjadi Gedung Merdeka) jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di

Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan tentara keamanan rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inpeksi Keuangan Bandung di pindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu :

1. Kelompok *Coorporative,* yaitu kelompok arti republik yang tidak ikut evakuasi dan bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok *non- Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergrilya di daerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer II, Kantor Inpeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya di bubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Agustus 1947. Kantor Inpeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh Mentri yang pertama Mr.Safrudin Parawiranegara, dan kemudian Mentri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoermosasmito sebagai Kepala Kantor Inpeksi Keuangan Bandung yang Pertama, periode 1947-1950, Berkantor di km”0” (*Groofpostwag*), yang saat ini jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inpeksi Keuangan Bandung berganti nama menjadi Inspeksi Pajak Bandung, pada tanggal 1 agustus 1980, kantor Inspeksi Pajak bandung di bagi dua bagian, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988, maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak yakni :

- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Dengan keluarnya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK.01/1994 tanggal 29 maret 1994,tentang Organisasidan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak terjadi perubahan nama dan batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees,
- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega,
- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying,
- Serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipecah

menjadi dua kantor pelayanan pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas.

Sejak bulan Agustus 2007, KPP Bandung Cibeunying dimodernisasi dan namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. KPP Pratama Bandung Cibeunying terletak di Jalan Purnawarman No.19 – 21 Bandung. Adapun wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying terdiri dari 6 Kecamatan dan 26 Kelurahan yang berada dalam pengawasan 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), yaitu meliputi :

- Kecamatan Cidadap
- Kecamatan Coblong
- Kecamatan Bandung Wetan
- Kecamatan Sumur Bandung
- Kecamatan Cibeunying Kaler
- Kecamatan Cibeunying Kidul

2.1.1 Fasilitas Kantor

Fasilitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratam Bandung Cibeunying diantaranya :

- Gedung Kantor milik sendiri
- Aula yang representatif
- Masjid Al-Hidayah
- Tempat Parkir Luas
- Sarana Olahraga

- Ruang TPT yang nyaman
- Perbankan Online
- Pelayanan dengan 3S : Senyum,Sapa,Salam

2.1.2 Wilayah Kerja Dan Gambaran Wajib Pajak

KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai wilayah kerja seluas 30 km² yang sangat strategis dan potensial, terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Sumur Bandung (3,40 km²), Kecamatan Bandung Wetan (3,39 km²), Kecamatan Cibeunying Kidul (5,25 km²), Kecamatan Cibeunying Kaler (4,50 km²), Kecamatan Cidadap (6,11 km²) dan Kecamatan Coblong (7,35 km²) yang secara keseluruhan didalamnya meliputi 26 (dua puluh enam) Kelurahan. Lingkar luar Wilayah KPP Pratama Bandung Cibeunying langsung berbatasan dengan wilayah lain diantaranya bagian Utara berbatasan dengan wilayah Kota Cimahi, bagian Selatan berbatasan dengan wilayah Karees, bagian Barat berbatasan dengan wilayah Bojonagara dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Wilayah KPP Pratama Bandung Cibeunying dilingkari oleh jalan-jalan protokol Kota Bandung yang merupakan pusat perbelanjaan, wisata kuliner, wisata kota, perkantoran, perdagangan dan pemerintahan, diantaranya :

- Jalan Ir. H. Juanda (Dago)
- Jalan RE Martadinata (Riau)
- Jalan Asia Afrika (1 sisi, 1/2 bagian)
- Jalan Braga
- Jalan Diponegoro (Gedung Sate)

- Jalan Merdeka
- Jalan Jenderal Ahmad Yani (1 sisi, 1/2 bagian)
- dsb

Sesuai dengan karakteristik jalan protokol Kota Bandung di sepanjang jalan tersebut berdiri gedung-gedung tinggi dan megah yang peruntukannya adalah sebagai kegiatan bisnis modern dan tradisional, yaitu : perkantoran (*office tower*), hotel, mall, *trade centre*, *hyper market,* apartemen, retail area, *factory outlet,* cafe, restoran, maupun *mix used building* yang meliputi seluruh peruntukannya tersebut. Selain itu juga jalan-jalan protokol ini terdapat beberapa universitas baik negeri maupun swasta, Kantor Pusat Kementerian, Kantor Pusat Pemerintahan Daerah baik Kota ataupun Provinsi dan Lembaga maupun BUMN. Tak kalah menariknya di jalanjalan protokol ini terdapat beberapa bangunan cagar budaya dan bersejarah seperti Gedung Sate, Gedung Asia Afrika dan Gedung Merdeka.

Dari gambaran tersebut jelas terlihat adanya potensial Pajak Penghasilan (PPh) baik Orang Pribadi (OP) ataupun Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besar dari kegiatan ekonomi dan bisnis di wilayah ini.

Beberapa kawasan yang dapat diunggulkan diantaranya :

- Sepanjang Jalan Ir. H. Juanda (Dago), dimana sepanjang jalan tersebut sekarang sudah menjadi pusat pariwisata, Caffe & Resto, *Factory Outlet,* Distro, Mall, Perkantoran, *Beautique Mall,* Hotel, Universitas dan *Real Estate.*

- Sepanjang Jalan RE. Martadinata (Riau), sebagian besar kawasan tersebut telah menjadi tempat wisata belanja (*Factory Outlet*), Caffe & Resto, Hotel, Rumah Mewah milik para pejabat dan masyarakat elite.
- Sepanjang Jalan Braga, kawasan ini merupakan klasik Kota Bandung yang banyak terdapat bangunan cagar budaya, Caffe & Resto, Mall, Apartemen sehingga menjadikan kawasan ini sebagai salah satu wisata kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri dan mancanegara.
- Kawasan Dago Atas dan Cigadung, merupakan *residence area* yang terdiri dari rumah-rumah besar dan mewah yang banyak dihuni oleh para dan mantan pejabat tinggi negara, artis-artis dan owner dari perusahaan-perusahaan besar.
- Jalan Diponegoro, merupakan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Kantor Pusat Kementerian, Hotel dan rumah-rumah para pejabat tinggi negara.
- Sepanjang Jalan Merdeka dan Jalan Asia Afrika, merupakan kawasan perkantoran modern (*office tower building*), perbankan, perdagangan, hotel bintang lima dan mall.
- Tamansari dan Dipatiukur, kawasan ini merupakan kawasan pendidikan dimana terdapat beberapa perguruan tinggi besar seperti ITB, UNPAD, UNISBA, UNPAS, UNIKOM dan perguruan tinggi swasta lainnya.

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying yaitu :

Visi KPP Pratama Bandung Cibeunying :

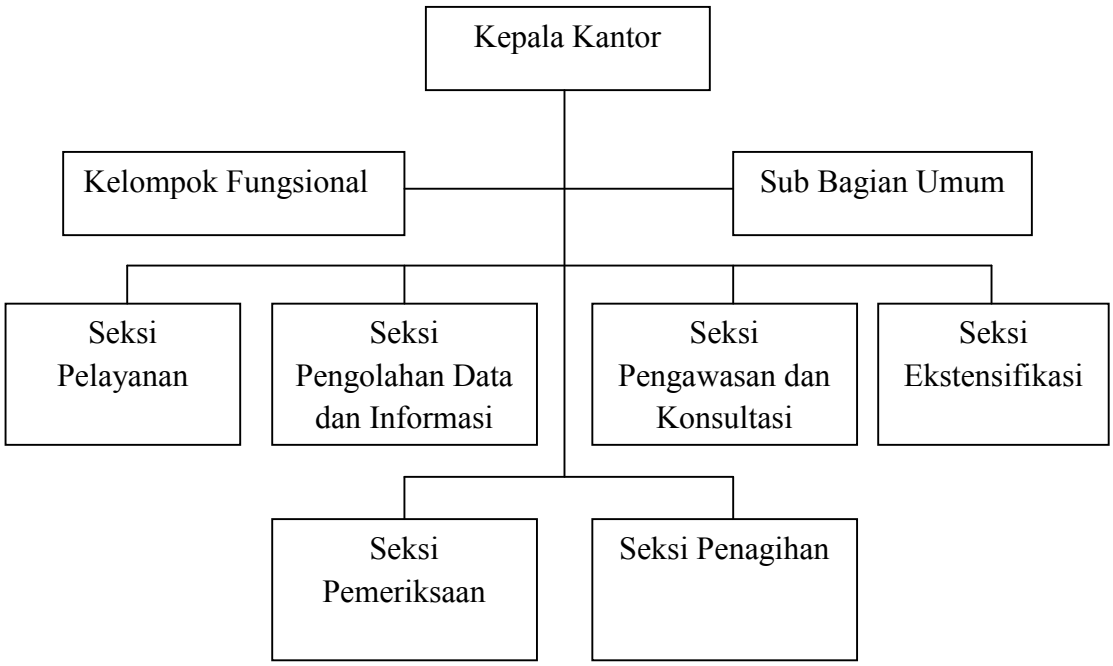
- Menjadi Institusi Pemerintah yang meyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi

Misi KPP Pratama Bandung Cibeunying :

- Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

2.3 Uraian Tugas *(Job Description)*

1. Kepala Kantor

   Orang yang mengepalai KPP Pratama dan bertanggung jawab atas kegiatan KPP Pratama. Kepala kantor memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak tidak langsung lainnya.

2. Sub Bagian Umum

   Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala KPP Pratama dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan

terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

3. Kelompok Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

4. Seksi Pelayanan

- Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan
- Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- Penyuluhan Perpajakan
- Penerimaan dan Pengolahan SPT dan surat lainnya
- Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak

5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- Pengumpulan dan pengolahan data
- Penyajian informasi perpajakan
- Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- Pengalokasian & penatausahaan bagi hasil PBB & BPHTB
- Pelayanan dukungan teknis komputer
- Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing
- Penyiapan laporan kinerja

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Waskon adalah salah satu seksi pada KPP Pratama di seluruh Indonesia. Seksi ini terbentuk setelah KPP melakukan modernisasi, dimana pembagian seksi pada KPP tidak lagi berorientasi pada jenis pajak, tetapi pembagian seksi pada KPP berorientasi pada fungsi seksi.

Waskon adalah singkatan dari dua suku kata yaitu pengawasan dan konsultasi. Fungsi umum dari seksi Waskon adalah melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak dalam hal menjalankan seluruh kegiatan administrasinya. Seksi Waskon dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi), yang tugasnya adalah mengkoordinir seluruh tugas-tugas pada seksi Waskon. Dan Kepala Seksi Waskon dibantu oleh Accounter Representative (AR). Tugas dari Accounter Representative adalah melaksanakan tugas-tugas teknis pada seksi Waskon I, seperti:

a. Memberikan penjelasan tentang kegiatan administrasi perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.
b. Menjadi tempat Konsultasi dan Konseling para Wajib Pajak.
c. Membuat surat-surat, seperti surat teguran, surat ucapan terima kasih, surat pemberitahuan kepada wajib pajak, dan lain sebagainya.
d. Memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak.
e. Mendisposisikan surat-surat, seperti surat masuk dan surat keluar.

f. Memberikan aturan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

g. Membuat *database* Wajib Pajak.

Seksi Waskon pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

2) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Pada Prinsipnya tugas dari kedua seksi tersebut adalah sama, dan yang membedakan hanyalah pembagian wilayah kerjanya. Hal ini diberlakukan dengan tujuan untuk mempermudah tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

7. Seksi Ekstensifikasi

Dalam Istilah Perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/ pemilik dan pegawai, wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan. Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying melalui seksi Ekstensifikasi perpajakan. Tugas seksi Ekstensifikasi perpajakan adalah melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, dan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

8. Seksi Pemeriksaan

    - Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
    - Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
    - Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sera administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

9. Seksi Penagihan

    Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang anjak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama Bandung Cibeunying

Kegiatan Operasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying meliputi:

1) Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2) Melaksanakan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi seperti menyusun penerimaan atas pelaporan dalam database, tata usaha perpajakan, pajak penghasilan perorangan, pajak penghasilan badan, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, PPn dan PTLL dan penagihan.
3) Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan, dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam

rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan penilaian kelenkapan surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN dan PTLL.

4) Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah wajib pajak.

   Secara berkala, kepala kantor pelayanan pajak melaporkan hasil kegiatan oprasional tersebut kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak setempat.